

KEWIRAUSAHAAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Rizwan Aryadi

rizwan.aryadi@ui.ac.id

Siti Hajati Hoesin

sitihajati@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Masalah krusial yang dihadapi pemerintah dewasa ini adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan. Salah satu persoalan sulit yang sering dihadapi pemerintah diberbagai negara adalah penyediaan kesempatan kerja bagi penduduknya. Menyikapi hal tersebut tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri, Jika kita dapat menciptakan satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Pengangguran juga menyangkut dimensi yang bersifat sosio-kultural. Rendahnya sikap mental/jiwa kemandirian juga terkait erat dengan masalah pengangguran. Penelitian ini akan mengkaji mengenai KEWIRAUSAHAAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana peran Wirausaha dan UMKM dalam membantu memperluas lapangan pekerjaan? Bagaimana upaya Pemerintah dalam mendukung Wirausaha dan UMKM? Kewirausahaan dan Usaha mikro Kecil-Menengah (UMKM) serta kontribusi yang diberikan sebagai perwujudan dari Kewirausahaan merupakan salah satu alternative solusi pemecahan masalah pengangguran serta ketenagakerjaan yang melanda bangsa Indonesia. Peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan terciptanya wirausaha dan UMKM melalui beberapa program-program pendukung yang dapat mempermudah kegiatan wirausaha dan UMKM.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja, Wirausaha, UMKM*

Abstrac

The crucial problems facing the government today are the problems of poverty, unemployment and income equality. One of the difficult problems that are often faced by governments in various countries is the provision of job opportunities for their residents. In response to this, the real responsibility lies with ourselves, If we can create one more job seat, at least the level of competition for employment will be slightly reduced. Unemployment also concerns dimensions of a socio-cultural nature. The low mental attitude/spirit of independence is also closely related to the problem of unemployment. This research will examine ENTREPRENEURSHIP AND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) AS ONE OF THE SOLUTIONS TO OVERCOME EMPLOYMENT PROBLEMS IN INDONESIA. The formulation of the problem in this paper is: What is the role of entrepreneurs and MSMEs in helping to expand employment opportunities? How is the Government's efforts in supporting Entrepreneurs and MSMEs?. Entrepreneurship and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as the contribution given as a manifestation of Entrepreneurship is one of the alternative solutions to solve the problem of unemployment and employment that plagues the Indonesian nation. The role of the government is also very influential in increasing the creation of entrepreneurs and MSMEs through several supporting programs that can facilitate entrepreneurial and MSME activities.

Key Words : *Employe, ENTREPRENEURSHIP, MSMEs*

PENDAHULUAN

Masalah krusial yang dihadapi pemerintah dewasa ini adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan. Salah satu persoalan sulit yang sering dihadapi pemerintah diberbagai negara adalah penyediaan kesempatan kerja bagi penduduknya. Karena itu, keberhasilan pemerintah dari suatu negara sering diukur dari kemampuan dalam menyediakan lapangan kerja atau menekan tingkat pengangguran.¹ Pengangguran yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Beberapa faktor penyebab yang bersifat eksternal antara lain kekurangan tersediaan lapangan kerja, rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja jika dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta kesenjangan ekonomi.

¹ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hal. 22

Per November 2019 Diperkirakan 185 juta jiwa usia produktif dan 65 juta jiwa adalah usia non produktif. Banyak yang menilai ini merupakan *window of opportunity* yang membuka kesejahteraan yang lebih baik pada bangsa Indonesia di bidang ekonomi, pendidikan dan tentu saja sumber daya manusia yang melimpah ruah. Hal ini berbanding terbalik dengan negara lain seperti Jepang, Norwegia, Serbia dan Korea Selatan yang mengalami penurunan jumlah kelahiran (dilansir Kompas, 2018).² Bonus demografi merupakan keuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena kita memiliki sumber daya manusia di usia produktif yaitu kisaran 15-64 tahun dengan jumlah sangat besar. Artinya kita memiliki banyak sumber daya manusia di usia yang siap bekerja dan jika tidak dibarengi dengan peningkatan pembukaan usaha baru maka akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks yaitu pengangguran yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nasional. Jumlah angkatan kerja yang tersedia di Indonesia per Agustus 2019 adalah 135 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 126,5 juta orang (BPS, 5 november 2019), sehingga terdapat selisih 8,5 juta orang yang bisa disebut sebagai pengangguran karena belum terdata sebagai penduduk yang bekerja.³

Dari total sekitar 8,5 Juta pengangguran ini sekitar 15% adalah kaum intelektual yang menyanggah gelar pendidikan perguruan tinggi. lalu pertanyaannya, siapa yang salah? mahasiswa, orang tua, atau Pemerintah?. Jawabannya tentu tergantung dari sudut mana kita memandang. Kita tidak dapat mengkambing hitamkan salah satu pihak. Masing-masing memiliki peran tersendiri, baik langsung maupun tidak langsung akibat pola pikir yang belum atau tidak mau diubah.

Disamping itu pengangguran juga menyangkut dimensi yang bersifat sosio-kultural dan kualitas Sumber Daya Manusia. Rendahnya sikap mental/ jiwa kemandirian juga terkait erat dengan masalah pengangguran, seperti tercermin dalam pandangan umum masyarakat kita yang seolah-olah menganggap bahwa yang namanya bekerja adalah menjadi pegawai. Dari dimensi sosial misalnya, generasi muda kita umumnya lebih tertarik menjadi pegawai dari pada melakukan usaha mandiri. Sementara secara kultur, para orang tua merasa lebih bangga dan bergengsi jika putra-putrinya bisa diangkat menjadi pegawai/

² <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/133125026/survei-cigna-akibat-pandemi-covid-19-indekspersepsi-kesejahteraan-indonesia?page=all> (diakses pada 2 Oktober 2021)

³ Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" Jurnal Sosio Humaniora, Vol 3, No.4, (September 2012), hal. 32.

karyawan, meskipun semuanya tahu bahwa kesempatan kerja sebagai pegawai/karyawan semakin terbatas.⁴

Meningkatnya demografi di masa mendatang harus dipersiapkan dengan sangat baik, karena tentunya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan mencari kerja. Lapangan kerja yang ada belum tentu memadai, mengingat saat ini banyak perusahaan besar yang tumbang karena efek negatif dari revolusi industri 4.0 yang menghasilkan teknologi destruktif atau teknologi yang merusak pasar yang sudah ada, walaupun disisi lain menimbulkan sisi kreatif dalam berbisnis. Sebagai contoh, Nokia merupakan merk raksasa di bidang teknologi komunikasi yang pernah jaya pada masanya dengan memberikan secanggih fitur game, pemutar musik, maupun kamera mobile phone. Namun perusahaan ini termasuk tidak bisa menandingi inovasi kompetitor seperti samsung ataupun iphone, sehingga keterlambatan inovasi menjadi penyebab jatuhnya kejayaan Nokia. Bahkan yang terbaru, pada 2020 yang lalu HERO Supermarket menutup hampir seluruh gerainya, dan mem-PHK ribuan karyawannya. Sisi positif banyak juga ditampilkan di era revolusi industri 4.0 dengan banyaknya teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalani pola kehidupannya. Gojek menjadi aplikasi yang rata-rata dimiliki oleh semua orang yang tinggal di kota besar. Hanya bermodal aplikasi ini kita bisa mendatangkan tukang ojek yang siap mengantar kita kemana saja, mendatangkan makanan yang kita inginkan tanpa harus repot keluar rumah dengan fitur GoFood, maupun mendatangkan salon ke rumah untuk sekedar creambath ataupun perawatan tubuh lainnya dengan fitur Go Glam. Kemudahan ada dalam genggam, hanya melalui handphone, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan, itulah penyebab maraknya penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara online.⁵

Menyikapi hal tersebut tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Akan lebih bijaksana jika tidak menyalahkan siapapun jika lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas dan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang harus diserap. Kita dapat mengambil tanggung jawab tersebut setidaknya-tidaknya dengan cara tidak ikut ambil bagian kontes tenaga kerja, paling tidak jumlah kontestan akan berkurang satu. Jika kita dapat menciptakan

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafka Aditama, 2014), hal.2.

⁵ Ade Resalawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2021), hal. 31.

satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Bahkan justru dapat menambah lapangan kerja dan membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu Kewirausahaan bisa menjadi alternatif solusi dari permasalahan pengangguran ini, karena dengan adanya wirausaha harapan terciptanya lapangan kerja baru dalam menyerap tenaga kerja bisa terwujud. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai **KEWIRAUSAHAAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran Wirausaha dan UMKM dalam membantu memperluas lapangan kerja?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mendukung Wirausaha dan UMKM?

KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan akan wirausaha

Memang menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi wirausaha memberi peluang untuk berkembang yang cukup besar, disisi lain resikonya juga tidak kecil. Jika menjadi wirausaha lebih mudah dari pada menjadi pekerja, akan lebih banyak orang yang akan memilih menjadi *ENTREPRENEURSHIP* dari pada menjadi pekerja. Oleh Karena itu, orang yang menjadi pekerja juga tidak dapat disalahkan karena tidak semua orang mampu menjadi *Entrepreneurship*. Akan tetapi jika seseorang berani menentukan jalan hidupnya dengan memilih menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*) maka dapat dipastikan masalah ketenagakerjan dapat dipecahkan dengan jiwa *entrepreneurship*. Hal ini dapat kita lihat dari keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara jepang ternyata disponsori oleh wirausahawan yang telah berjumlah 2% tingkat sedang, wirausaha kecil sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Inilah kunci keberhasilan pembangunan negara jepang.⁶

⁶ Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2019), hal. 18

Wirausaha dalam buku Eddy Soeryanto Soegoto, yang berjudul **Menjadi Pebisnis Ulung** menuliskan bahwa wirausaha atau disebut juga entrepreneur adalah orang yang berjiwa kreatif, mandiri, inovatif, ulet dan tekun, percaya diri, rajin, disiplin, berani menanggung resiko dan jeli melihat peluang. Dari buku yang sama Geoffrey G. Meredith (1995) mengungkapkan bahwa wirausaha adalah orang yang berkarakter memiliki kemampuan dalam melihat kesempatan bisnis yang ada, dengan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan guna meraih kesuksesan. Sedangkan Skinner (1992) mengungkapkan wirausaha adalah seseorang berani mengambil resiko usaha untuk mengelola dan mengorganisasikan bisnis dan menerima imbalan jasa berupa profit. Dari definisi wirausaha yang diungkapkan di atas, wirausaha memiliki ciri dan sifat yaitu: Percaya diri, Berorientasi pada tugas dan hasil, berani menanggung resiko, berjiwa pemimpin, kreatif dan inovatif, berorientasi ke masa depan, jujur, ulet, tekun dan sabar.⁷

Making Indonesia 4.0” terdengar sering diungkapkan belakangan ini. Kalimat tersebut seolah menyatakan bahwa negara kita tengah mempersiapkan diri sebagai top ten ekonomi terkuat di dunia. Ini bukan mustahil kita dapatkan jika, prioritas yang ditetapkan Pemerintah dapat kita pahami dengan baik dari sisi persiapan maupun pelaksanaannya karena sudah memberikan arah dan fokus dengan jelas bagi perkembangan industri di masa mendatang dengan mengedepankan 5 sektor dan 10 prioritas nasional sebagai bidikan utama agar mudah dipahami oleh semua pelaku industri termasuk calon wirausaha atau pengusaha yang akan/sudah menjalankan bisnisnya agar bisa bersentuhan dengan bidang-bidang yang dibidik ini.

Sepuluh strategi tersebut semakin mengerucutkan ke langkah-langkah yang harus dilakukan dengan segera (*Quick Wins*) dalam membantu bidang kewirausahaan untuk berkembang lebih cepat dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang diakibatkan bonus demografi demi menghindari tingkat pengangguran yang meningkat yang akan membentuk *negatif multiplier effect* yaitu salah satunya tingkat kejahatan yang semakin meningkat yang akan menurunkan keberanian investor dalam berinvestasi di Indonesia.

⁷ Idris y. N., *Peran Wirausaha dalam mengatasi masalah pengangguran*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2020) hal. 24

Wirausaha dan UMKM Yang Dapat Memperluas Jumlah Lapangan Kerja

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja oleh karena kemampuan pemerintah sangatlah terbatas akan hal itu. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih kurang dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan salah satu persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.⁸

Selanjutnya jika dikaitkan antara kewirausahaan dengan UMK maka kewirausahaan memang tidak selalu identik dengan usaha Mikro Kecil (UMK). Namun sudah sejak lama kewirausahaan dianggap sebagai “faktor pendorong utama” dibalik pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Bentuk usaha yang sesuai bagi wirausaha biasanya adalah usaha kecil, karena usaha kecil biasanya memiliki beberapa pekerja sehingga memudahkan wirausaha mengorganisasikan usahanya. Perusahaan tersebut tidaklah selamanya kecil, karena sejalan dengan perkembangan usaha maka bentuk dan ukuran usaha tersebut akan berubah pula dapat menjadi usaha menengah dan bahkan pada akhirnya usaha besar atau bahkan multinasional. Pada saat itu juga peran wirausaha sebagai pengelola usaha akan digantikan oleh pekerja/ manajer profesional. Di negara kita usaha kecil biasa disebut untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang berkisar antara 20-99 orang.⁹

Kontribusi UMKM Dalam Menanggulangi Masalah Ketenagakerjaan

Peranan Usaha Kecil Menengah sangat bagus dalam penyerapan tenaga kerja yang biasanya padat karya. Jika diperkirakan di masa mendatang robotic, mesin dengan artifial intelengence akan mendominasi perusahaan besar sehingga terjadi otomatisasi yang menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan, maka UMKM bisa menjadi jawaban untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

⁸ Tulus T. H, Tambunan, UMKM Di Indonesia, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2009), hal. 28 ⁹ Ibid, hal. 30

Sehingga Pelatihan dan pengembangan terhadap UMKM sangat perlu karena banyak keuntungan yang didapat selain menyerap tenaga kerja, UMKM menghasilkan barang dan jasa di tingkat yang terjangkau bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah juga.

Usaha mikro kecil ternyata memiliki kontribusi yang tidak kecil, bukan hanya mengatasi masalah perekonomian suatu bangsa akan tetapi juga memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan (pengangguran) suatu bangsa. Sejalan dengan peran penting kewirausahaan dan wirausaha dalam pembangunan ekonomi, demikian juga kontribusi UMK sebagai perwujudan dari kewirausahaan itu sendiri. Di berbagai negara, usaha kecil ternyata memiliki kontribusi yang tidak kecil. Di Amerika Serikat, misalnya rata-rata perusahaan hanya mempekerjakan tidak lebih dari 100 orang karyawan dan sebagian besar bekerja pada usaha yang berskala kecil. Dengan kata lain, menurut catatan *The Us Small Business Administration (SBA)*, UK disana telah menyerap lebih dari separuh (58%) tenaga kerja. Tidak hanya itu saja, 40% GDP AS disumbang oleh UK. Hal ini tidak mengherankan mengingat jumlah UK yang telah mencapai 18,6 juta buah.⁹

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015 jumlah UM telah mencapai 40 juta buah, dan UK sebanyak 105.000 buah. Dari unit usaha sebanyak ini UMK mampu menyerap 70 juta pekerja atau sekitar 75% dari total pekerja yang ada. Jadi ada beberapa alasan mengapa usaha kecil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di berbagai negara. Diantaranya adalah bahwa usaha kecil secara historis dikenal mampu menampung tenaga kerja, lebih inovatif dan memberikan kontribusi penting bagi perusahaan-perusahaan besar.

Usaha kecil sering disebut sebagai “katup pengaman” dalam masalah pengangguran, dan berperan sebagai pemasok-pengecer bagi operasi perusahaan besar.¹⁰

Untuk sektor-sektornya sendiri, dewasa ini Paling tidak ada 5 (Lima) jenis UMK yang paling banyak dimasuki, yakni bisnis eceran, jasa, bisnis distribusi, agribisnis/pertanian, dan` manufaktur.

⁹ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo, “Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang Di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, hal 9.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Nasional 2017

Peran Pemerintah Dalam Membantu dan Mewujudkan Terciptanya UMKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital.

Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

2. Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020.

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu:

- Subsidi bunga/margin
- Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

- Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
- Penjaminan loss limit kredit UMKM
- Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
- Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
- Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

6. Layanan Sistem Online Single Submission (OSS)

Sejak diluncurkan oleh Presiden pada Agustus 2021 yang lalu, OSS diklaim akan sangat membantu UMKM. Misalnya kemudahan perizinan, akses

permodalan, digitalisasi UMKM, dan akses ke pasar yang lebih mudah khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu layanan OSS tidak hanya memudahkan dari segi perizinan. Namun, juga memudahkan untuk pengurusan insentif dan pajak karena menyediakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.¹¹

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.¹² Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.¹³

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatankegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang

¹¹ Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2020), hal 118

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹³ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti : perkembangan usaha harus di ikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengolah sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Kelebihan dan kekurangan UMKM

UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Makro terdiri dari 2 faktor :

- 1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yang antaranya : a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsifungsi pemasaran mampu dalam mengakseskannya. Khusus nya dalam informasi pasar Sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
- 2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan dari para pelaku UMKM memperoleh kredit. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/industri yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tetap berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya

UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.¹⁴

Peran UMKM Dimasa Yang Akan Datang

Adatiga alasan negara untuk mendorong usaha kecil untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah bahwa usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang baik dalam hal yang menghasilkan tenaga kerjayang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang

¹⁴ Panji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), hal 36

terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha mikro berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang.

Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Berikut peran usaha mikro menurut departemen koperasi.

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar
- 3) Pemain penting dalam kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi
- 5) Kontribusinya terhadap negara pembayaran.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri Usaha Mikro Kecil dan Menengah memegang peranan penting bagi negara untuk memajukan perekonomian suatu negara. demikian, indonesia sejak di terpa badai krisis finansial pada 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka goyang dari dampak yang ditimbulkan namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga hasil produksi UMKM tidak hanya di pasarkan di pasar lokal tetapi di luar daerah dan semakin berkembang. Apalagi di dukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Serta tidak hanya dari pemerintah saja perusahaan dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi masyarakat munculnya usaha-usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan peran UMKM tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan melibatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Departemen Koperasi 2008 Tersedia di www.depkop.go.id. Situs Resmi Departemen.

¹⁶ Adnan Husadi Putra, "Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisis Sosiologi*, VOL 5, No.2, (Desember 2011), H. 41

Dapat dilihat bahwa UMKM sangat berperan sangat penting dalam sebuah kesejahteraan masyarakat, dimana UMKM merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat membantu pembangunan ekonomi, dengan kegiatan UMKM ini dapat membantu banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya UMKM juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewirausahaan dan Usaha mikro Kecil-Menengah (UMKM) serta kontribusi yang diberikan sebagai perwujudan dari Kewirausahaan merupakan salah satu alternative solusi pemecahan masalah pengangguran serta ketenagakerjaan yang melanda bangsa Indonesia. Kewirausahaan dan UMKM sangat berpotensi menjadi solusi masalah ketenagakerjaan, karena jumlah tenaga kerja yang begitu besar maka tingkat pengangguran atau pencari kerja akan meningkat dengan tajam. Peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan terciptanya wirausaha dan UMKM melalui beberapa program-program pendukung yang dapat mempermudah kegiatan wirausaha dan UMKM.

Saran

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk kemajuan para wirausahawan dan pelaku UMKM, tentu kedepannya diperlukan regulasi yang baru agar kemajuan UMKM terpenuhi baik dari segi dukungan formal/maupun Informal utamanya payung hukum yang menaungi. Sebaiknya para pelaku Wirausaha mendaftarkan Usahanya sebagai UMKM agar mendapat kemudahan dan dukungan penuh dari kemudahan-kemudahan berusaha yang telah disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo. *“Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang Di Kota Semarang”*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis.

Anoraga Panji, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), hal 36

- Bachtiar, Rifai. “Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” Jurnal Sosio Humanniora. Vol 3. No.4. September 2018.
- Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2020).
- Husadi, Adnan Putra. “Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”. Jurnal Analisis Sosiologi. VOL 5. No.2. Desember 2020
- Johan, Beny. “Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung”. (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung. 2016..
- Nurdin, Idris Y., *Peran Wirausaha dalam mengatasi masalah pengangguran*, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2020)
- Noveria Mita, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011)
- Putra, Adnan Husadi. “Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”. Jurnal Analisis Sosiologi. VOL 5. No.2. Desember 2019.
- Resalawati, Ade. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2016.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama ,2014), hal.2.
- Tambunan, Tulus T. H, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2019).

Undang-undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Website

<https://money.kompas.com/read/2021/09/29/133125026/survei-cigna-akibat-pandemi-covid-19-indekspersepsi-kesejahteraan-indonesia?page=all>
(diakses pada 2 Oktober 2021)

www.depkop.go.id (diakses pada 4 Oktober 2021)